

PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI *E-PURCHASING* DAN *E-KATALOG*

Mega Mawarni¹, Gading Gamaputra² & Selvi Diana Meilinda^{3*}

^{1,2} Jurusan Administrai Publik, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang No. 18, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

³ Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lampung
Jalan Sumantri Brodjonegro No. 1, Kampus FISIP Unila, Bandarlampung, Indonesia

*Korespondensi: selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id

Recieved: 20/11/2020 | Revised: 11/12/2020 | Accepted: 19/12/2020

Abstract

Procurement of government goods and services carried out through e-catalog applications can make government procurement of goods and services efficient, the time required is shorter, the administration process also becomes simple. The procurement of goods through the E-Catalog application at the Inspectorate of East Java Province still faces problems in the implementation process. This research was conducted using qualitative methods with descriptive research type. Data collection techniques were collected using interviews, observation, and documentation. The results of research on the application of the principles of procurement of goods and services namely, Efficient, Procurement of goods through the e-catalog application can save the budget. Effective, the results of the procurement of goods carried out through the e-catalog application for all processes have been carried out with a fast time. Transparent, General Procurement Plan displayed on General Procurement Plan Information System contains all procurement information. Open, procurement of goods has been announced through General Procurement Plan Information System accessible to all the general public. Competing, Procurement of motorized land transportation equipment in the Inspectorate of East Java Province conducted through the e-catalog application, there is no competition between providers of goods and services. Fair, Procurement of motorized land transportation equipment is only provided by PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO as an official distributor of Toyota cars. Accountable, Procurement of goods and services in the Inspectorate of East Java Province is in accordance with regulations and results of procurement of goods can be accounted for

Keywords: Efficient, Effective, Transparent, Competitive, Open, Fair, Accountable

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui aplikasi e-katalog dapat menjadikan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi efisien, waktu yang diperlukan lebih singkat, proses administrasi juga menjadi sederhana. Pengadaan barang melalui aplikasi E-Katalog di Inspektorat Provinsi Jawa Timur masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu, Efisien, Pengadaan barang melalui aplikasi e-katalog dapat menghemat anggaran. Efektif, Hasil dari pengadaan barang yang dilakukan melalui aplikasi e-katalog untuk seluruh prosenya telah dilakukan dengan waktu yang cepat. Transparan, Rencana Umum Pengadaan yang ditampilkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan telah memuat seluruh informasi pengadaan. Terbuka, Pengadaan barang telah diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum. Bersaing, Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor yang dilakukan melalui aplikasi e-katalog, tidak terjadi persaingan antara penyedia barang dan jasa. Adil, Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor hanya disediakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO sebagai distributor resmi mobil toyota. Akuntabel, Pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dari pengadaan barang.

Kata kunci: Efisien, Efektif, Transparan, Bersaing, Terbuka, Adil, Akuntabel

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan Instansi Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai dari perencanaan kebutuhan yang disusun dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) hingga serah terima hasil pekerjaan, seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dibiayai oleh APBN/APBD.

Pengadaan barang dan jasa secara konvensional merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang proses pengadaannya dilakukan secara manual, mulai dari proses pengumuman hingga serah terima hasil pekerjaannya dilakukan secara langsung dengan tatap muka, sehingga hal ini menyebabkan seringnya terjadi penyimpangan yang melibatkan pejabat pengadaan dan pihak penyedia. Menurut Putra (dalam Danuta, 2017) Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa selama periode 2004 hingga 2010 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani oleh KPK mencapai 44%. Menurut hasil survey Indonesia Procurement Watch (Faupel et al, 2016) Sejumlah 792 perusahaan konstruksi, konsultasi, dan pemasok sampel yang dilakukan secara acak oleh Indonesia Procurement Watch 2010 memberikan bukti sugestif lebih lanjut tentang korupsi dalam proses pengadaan pemerintah dengan 92,7 % responden menjawab bahwa mereka berpikir perusahaan mereka pernah memberikan suap kepada pejabat pemerintah yang terlibat dalam mengelola pengadaan, Selain itu, 97,3 % responden percaya bahwa itu tidak mungkin memenangkan tender kontrak tanpa penyuapan dan lebih dari 95 % mengindikasikan bahwa nilai suap lebih dari 10 % dari nilai kontrak.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindak korupsi, banyaknya celah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara manual menjadi penyebab tingginya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Restianto (dalam Danuta, 2017) Pengadaan barang dan jasa secara konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan persaingan antara penyedia barang dan jasa menjadi terbatas serta kurangnya pengawasan oleh masyarakat, sementara kurangnya efisiensi dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara.

Dengan adanya berbagai masalah terkait pengadaan barang dan jasa tersebut pemerintah melalui Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengubah proses pengadaan barang dan jasa dari konvensional yang dinilai banyak memunculkan masalah menjadi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi e-katalog yang dapat diawasi langsung oleh LKPP, sehingga secara sistem dapat berjalan lebih transparan, efektif dan efisien, serta untuk meminimalisir tindak KKN yang melibatkan penyedia dan pengguna pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah bentuk perwujudan konsep digitalisasi secara sistematis dan aplikatif

Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Bab III Uraian Tugas dan Fungsi pasal 4 menyatakan bahwa tugas Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta membantu tugas Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pengawas pemerintahan sangat dibutuhkan pengadaan barang dan jasa. Inspektorat Provinsi Jawa Timur menjadi pilihan peneliti dalam penulisan artikel, karena dalam penerapan *e-government* yang di wujudkan pada Sub Bagian Tata Usaha khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik melalui aplikasi E-Katalog.

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah agar menjadi lebih transparan, efisien, dan memanfaatkan kemajuan teknologi, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang terbebas dari tindak KKN, sehingga pemerintah harus mengelola sumber daya dengan baik, dan melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta untuk

meningkatkan peran dunia usaha dan industri kreatif dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Katalog merupakan bentuk dari perubahan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan akibat dari timbulnya berbagaimasalah dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini mengalami perkembangan dapat memberikan kemajuan di berbagai bidang, pengadaan barang dan jasa yang dulunya dilakukan dengan sistem konvensional yang rawan terjadinya praktik KKN, namun sekarang ini dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Katalog, serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah langsung diawasi oleh LKPP sehingga berjalan secara transparan, efisien, dan kompetitif, dan dapat memperoleh barang sesuai dengan kebutuhan.

E-katalog dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan *E- Purchasing* merupakan sistem informasi yang memuat seluruh informasi dari produk yang ditawarkan oleh penyedia, informasi tersebut meliputi daftar, merek, jenis, harga, spesifikasi teknis, dan jumlah ketersediaan barang dan jasa tertentu. Katalog elektronik (*e-catalogue*) menjadikan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efisien, waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi lebih singkat, proses administrasi juga menjadi lebih sederhana, dalam tahap pengambilan dan pemasukan dokumen tidak perlu lagi dengan tatap muka, sehingga dapat meminimalisir tingkat kecurangan antara pejabat pengadaan dengan penyedia, selain itu e-katalog juga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah untuk memperoleh harga terbaik dari berbagai penyedia, pihak penyedia mencantumkan harga secara terbuka sesuai dengan harga dipasaran. Hal ini sesuai Ratnawati *et al* (2020) proses *e-Purchasing* dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dinilai dari tercapainya prinsip keterbukaan, keadilan, kepastian hukum. efisiensi, dan prinsip akuntabilitas yang telah mendapatkan kategori sangat baik.

Pengadaan barang melalui metode pengadaan langsung melalui aplikasi E-Katalog di Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Sub Bagian Tata Usaha masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya, diantaranya yaitu lamanya respon vendor ketika sudah dilakukan pemesanan barang dan terjadi keterlambatan pengiriman barang yang telah dipesan. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pengadnan barang dan jasa, namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala tersebut peneliti ingin meneliti penerapan prinsip pengadaan barang atau jasa pada Sub Bagian Tata Usaha di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

METODE

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara mendalam dengan mendeskripsikan hasil penelitian melalui kata-kata yang berkaitan tentang penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang dan jasa Melalui Aplikasi E-katalog. Sumber data yang digunakan penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan instrument penelitian untuk menafsirkan dan menganalisis data. Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data yang berupa pedoman atau daftar pertanyaan wawancara, alat perekam wawancara, dan buku catatan. Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung. Dokumentasi, sumber data sebagai penguat metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Observasi, pengamatan langsung yang dapat dilihat yang akan melatih pengembangan kalimat berdasarkan apa yang sudah diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan implementasi Pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi e-Katalog dilakukan dengan cara memaksimalkan penggunaan kemajuan di bidang teknologi informasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak KKN. Implementasi kebijakan ini menggunakan pendekatan prosedural dan manajemen (Dimiyati *et al.*,

2019) dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan yang ada dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, resiko panitia juga berkurang karena teknologi membantu mengurangi kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga pihak penyedia dan pengguna barang dan jasa merasa nyaman dengan bantuan aplikasi e-katalog.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan organisasi seperti barang dan jasa yang sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-katalog ini bertujuan untuk terpenuhinya barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan jumlah yang cukup dari setiap uang yang dibelanjakan serta tersedianya informasi terkait pengadaan barang dan jasa, menciptakan persaingan yang sehat di dunia usaha dan memberikan keadilan bagi seluruh penyedia barang dan jasa.

Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, karena seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi teknis dan keuangan serta administrasi. Sehingga penelitian ini didasarkan pada penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

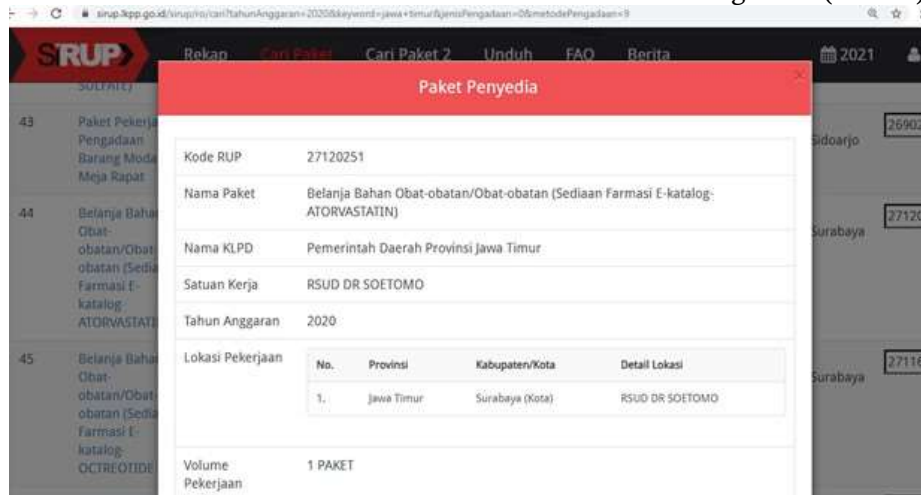
Efisien

Penerapan prinsip efisien dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 6 ayat yaitu penggunaan dana dan daya dalam pengadaan barang dan jasa harus diusahakan seminimal mungkin untuk memperoleh kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya.

Dana yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa berasal dari APBD, penggunaan dananya relatif lebih efisien karena proses pengadaannya dilakukan melalui sistem elektronik sehingga dapat memangkas biaya-biaya tambahan. Pengadaan barang/jasa di Inspektorat Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi e-katalog dimuali dengan pembuatan RUP (Rencana Umum Pengadaan) barang dan jasa tahun 2019 yang disusun tahun 2018 dan disahkan pada tanggal 31 Oktober 2018, serta digunakan untuk satu tahun anggaran.

Dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor dibagi menjadi 2 paket pekerjaan, yang pertama pengadaan mobil 2500 cc M/T berjumlah 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 419.000.000, (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah), dan pengadaan mobil 2000 cc M/T berjumlah 3 unit dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.071.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Rupiah). RUP (Rencana Umum Pengadaan Pengadaan) barang dan jasa di Inspektorat Provinsi Jawa Timur diumumkan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

Gambar 1. RUP dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



Sumber: www.sirup.lkpp.go.id, 2020.

Sesuai dengan RUP (Rencana Umum Pengadaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019, pengadaan alat- alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode *e-Purchasing* melalui aplikasi e-katalog dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena total pagu anggarannya sejumlah 1,49 M, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf c PPK dalam pengadaan barang dan jasa memiliki tugas melakukan *e-Purchasing* dengan nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp. 200.000.000,00. Ibu Anggun Anita Sari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembuatan paket pembelian barang dan mengirimkan permintaan pembelian kepada PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK-TSO selaku penyedia barang yang telah dipilih oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur melalui Ibu Anggun Anita Sari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ibu Anggun Anita Sari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah melakukan pemesanan Mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T VIN 2018 sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp. 296.950.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga total harga untuk 2 unit mobil sebesar Rp. 593.900.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Juta Rupiah), dan mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 Q M/T VENTURER VIN 2018 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 391.460.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), sehingga total nilai pengadaan alat- lat angkutan darat bermotor tersebut berjumlah Rp. 985.360.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pengadaan alat- alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang telah direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2019 untuk pengadaan mobil 2500 cc M/T berjumlah 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 419.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) setelah dilakukan pembelian barang melalui aplikasi e-katalog diperoleh harga Rp. 391.460.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 27.540.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan untuk pengadaan Mobil 2000 cc M/T yang berjumlah 3 unit dengan harga satuan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa tahun 2019 Rp. 357.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan setelah dilakukan pembelian barang melalui aplikasi e-katalog diperoleh harga Rp. 296.950.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) artinya pengadaan barang melalui aplikasi e-katalog dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 60.050.000,00 (Enam Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kelebihan anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Efektif

Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa pasal 6 ayat (b) dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sehingga dari proses pengadaan barang dan jasa dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah, yang dapat diukur melalui kualitas dan kuantitas dari pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada ketepatan waktu dalam pengadaan barang/jasa melalui aplikasi e-katalog.

Pengadaan alat- alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2019 untuk pemilihan penyedia dijadwalkan pada bulan Februari 2019. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf c PPK dalam pengadaan barang dan jasa memiliki tugas untuk melaksanakan *e-Purchasing* untuk nilai pengadaan di atas Rp. 200.000.000,00, pada tanggal 19 Februari 2019 Ibu Anggun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket pembelian mobil 2500 cc M/T sejumlah 1 unit dan mobil 2000 cc M/T sebanyak 2 unit, kemudian mengirimkan permintaan pembelian kepada PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO.

Sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pasal 6 ayat (b) dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sehingga dari proses pengadaan barang dan jasa dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah, yang dapat diukur melalui kualitas dan kuantitas dari

pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada ketepatan waktu dalam pengadaan barang/jasa melalui aplikasi e-katalog, namun untuk pembelian Mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T VIN 2018 pelaksanaannya tidak sesuai dengan RUP (Rencana Umum Pengadaan) barang dan jasa tahun 2019 seharusnya pengadaan mobil tersebut berjumlah 3 unit namun dalam pelaksanaannya pengadaan barang pada triwulan I yang dilakukan pada bulan Februari 2019 pengadaan mobil 2000 cc M/T hanya berjumlah 2 unit dan untuk 1 unit pengadaannya dilakukan pada triwulan II.

Pada tanggal yang sama PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO memberikan persetujuan atas permintaan pembelian pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur hal ini sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online huruf F Pihak penyedia barang memiliki kewajiban untuk menanggapi pesanan barang, baik menyetujui atau menolak pesanan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja sejak Tanggal pemesanan barang melalui sistem e- Purchasing.

Sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online huruf F, pihak penyedia barang memiliki kewajiban mengirimkan barang kepada pihak pembeli untuk area luar Jabodetabek dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya pengiriman barang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019, PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO melalui distributor cabang Basuki Rachmat Surabaya melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur terkait barang yang telah dipesan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga dalam hal pengiriman barang mengalami keterlambatan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi melalui *e-Purchasing*.

Barang yang telah diterima oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur kemudian dilakukan pemeriksaan administratif oleh Panitia PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan) yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 2 orang anggota, yang kemudian melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang yang telah diterima. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (2) tugas PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang bernilai Rp. 985.360.000,00 (Sembilan Ratus Juta Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pemeriksaan administratifnya dilakukan oleh PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan)

PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang yang diterima, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan) membuat berita acara hasil pemeriksaan administratif, jika barang yang diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi selanjutnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), membuat status penerimaan barang melalui aplikasi e-katalog, hal ini sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online huruf G, PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/institusi membuat status penerimaan barang kepada penyedia barang melalui aplikasi e-katalog.

Sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online PPHP menerima kemudian melakukan pemeriksaan barang yang dikirimkan oleh penyedia barang berdasarkan surat pesanan pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja mulai dari tanggal barang diterima oleh pihak pembeli, kecuali diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian kerja. pemeriksaan administratif dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019. PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan) telah memeriksa dengan teliti hasil pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/ operasional (mobil), kemudian menyatakan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap dan sesuai.

Transparan

Penerapan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 6 ayat (1) huruf c yaitu semua ketentuan dan

informasi terkait pengadaan barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi seluruh peserta penyedia barang dan jasa yang berkompeten dalam mengikuti pelelangan atau seleksi.

Dalam menjalankan prinsip transparan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dilkaukan dengan memberikan informasi yang lengkap terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Hal ini sesuai dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IV Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi pengumuman RUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melauai aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Gambar 2. Beranda Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



Sumber: www.sirup.lkpp.go.id, 2020.

87

Gambar diatas merupakan beranda SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dapat diakses melalui <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro> dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan peyedia barang dan jasa.Masyarakat dapat melihat RUP (Rencana Umum Pengadaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengetikan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam kolom kata kunci kemudian klik tombol cari, maka akan muncul seluruh RUP (Rencana Umum Pengadaan) barang dan jasa di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.Mengenai RUP(Rencana Umum Pengadaan) barang dan jasa dapat ditunjukan melalui Gambar 3 berikut.

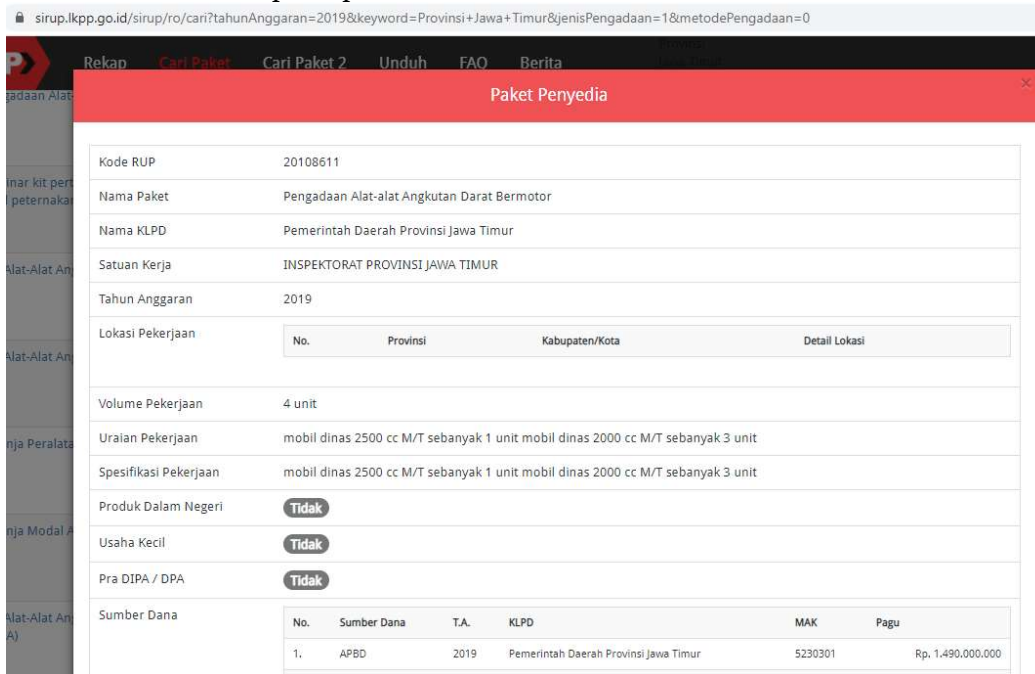
Gambar 3. RUP (Rencana Umum Pengadaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Pemilihan	K/L/PD	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Mobil Operasional Laboratorium	510,40 JT	Barang.	e-Purchasing	November 2020	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	INSPEKTORAT DAERAH	Jawa Timur-Sidoarjo (Kab.),	26812625
2	Kendaraan Dinas Perorangan Eselon 2, Kendaraan Dinas Perorangan Eselon 2	472,47 JT	Barang.	e-Purchasing	October 2020	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	INSPEKTORAT DAERAH	Jawa Timur-Sidoarjo (Kab.),	26283983
3	Pengadaan Mobil Dinas	265,00 JT	Barang.	e-Purchasing	October 2020	Pemerintah Daerah Kota Blitar	INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR	Jawa Timur-Blitar (Kota),	26497942
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	18,00 JT	Barang.	e-Purchasing	October 2020	Pemerintah Daerah Kota Blitar	INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR	Jawa Timur-Blitar (Kota),	26497943

Sumber: www.sirup.lkpp.go.id, 2020.

Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang ditampilkan pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor terdapat pada nomor 104 dengan pagu anggaran sebesar 1,4 M, dengan jenis pengadaan barang melalui metode e-purchasing yang dilakukan pada bulan Februari 2019.

Gambar 4. Halaman detail paket pada SIRUP



Sumber: www.sirup.lkpp.go.id, 2020.

Gambar 5. Detail paket pada SIRUP dalam format pdf

Detail Paket																			
Kode RUP	20108611																		
Nama Paket	Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor																		
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur																		
Satuan Kerja	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR																		
Tahun Anggaran	2019																		
Lokasi Pekerjaan	No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi																		
Volume Pekerjaan	4 unit																		
Uraian Pekerjaan	mobil dinas 2500 cc M/T sebanyak 1 unit mobil dinas 2000 cc M/T sebanyak 3 unit																		
Spesifikasi Pekerjaan	mobil dinas 2500 cc M/T sebanyak 1 unit mobil dinas 2000 cc M/T sebanyak 3 unit																		
Produk Dalam Negeri	Tidak																		
Usaha Kecil	Tidak																		
Pra DIPA / DPA	Tidak																		
Sumber Dana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2019</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur</td> <td>5230301</td> <td>Rp. 1.490.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.490.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	5230301	Rp. 1.490.000.000	Total Pagu					Rp. 1.490.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu														
1.	APBD	2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	5230301	Rp. 1.490.000.000														
Total Pagu					Rp. 1.490.000.000														
Jenis Pengadaan	Barang,																		
Total Pagu	Rp. 1.490.000.000																		
Metode Pemilihan	E-Purchasing																		
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>Februari 2019</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	N/A	Februari 2019														
Mulai	Akhir																		
N/A	Februari 2019																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Februari 2019</td> <td>Februari 2019</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Februari 2019	Februari 2019														
Mulai	Akhir																		
Februari 2019	Februari 2019																		
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Februari 2019</td> <td>Februari 2019</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Februari 2019	Februari 2019														
Mulai	Akhir																		
Februari 2019	Februari 2019																		
Tanggal Perbarui Paket	2019-04-02 16:28:13.18																		

Sumber: www.sirup.lkpp.go.id, 2020.

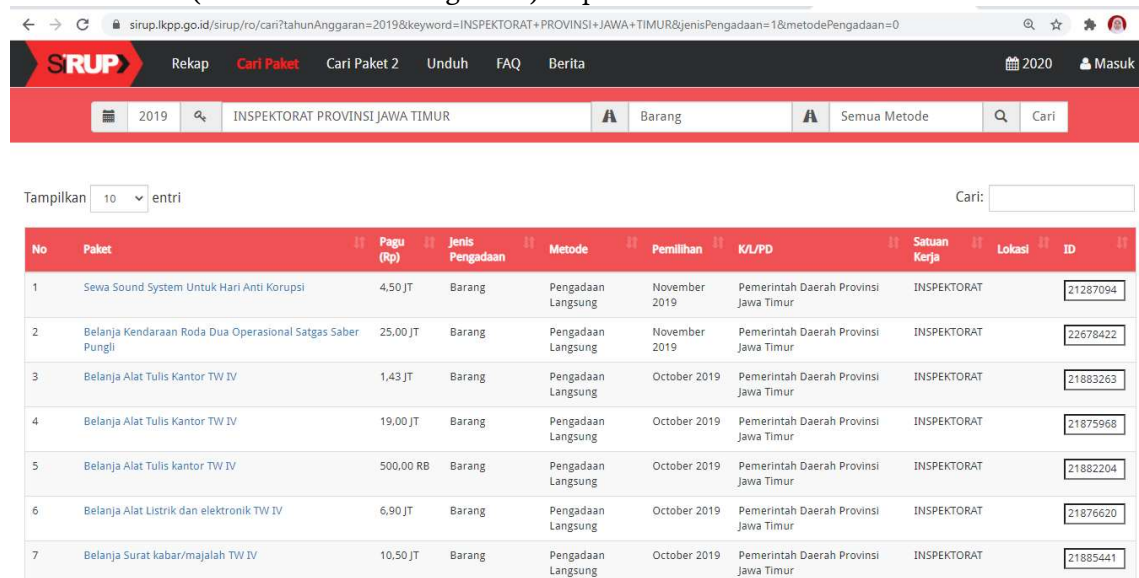
Dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang ditampilkan pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) telah memuat kode RUP, Nama Paket, Lokasi Pekerjaan, Tahun Anggaran, volume pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, sumber dana, jenis pengadaan, waktu pelaksanaan, metode pengadaan dan pagu anggaran. Untuk mencetak informasi detail paket pekerjaan, dapat dilakukan dengan klik tombol print, maka informasi detail paket akan tersimpan dalam format pdf yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Terbuka

Prinsip terbuka dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuandan prosedur yang jelas dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah diumumkan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum serta penyedia barang dan jasa, dalam informasi tersebut telah memuat informasi terkait pagu anggaran, jenis pengadaan, waktu pengadaan barang, serta lokasi pengadaan barang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IV Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi pengumuman RUP (Rencana Umum Pengadaan) dilakukan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Dengan diumumkannya RUP (Rencana Umum Pengadaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dapat memberikan informasi kepada para penyedia barang dan jasa terkait pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019. RUP (Rencana Umum Pengadaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 6. RUP (Rencana Umum Pengadaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur



No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Pemilihan	K/L/PD	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Sewa Sound System Untuk Hari Anti Korupsi	4,50 JT	Barang	Pengadaan Langsung	November 2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	INSPEKTORAT		21287094
2	Belanja Kendaraan Roda Dua Operasional Satgas Saber Pungli	25,00 JT	Barang	Pengadaan Langsung	November 2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	INSPEKTORAT		22678422
3	Belanja Alat Tulis Kantor TW IV	1,43 JT	Barang	Pengadaan Langsung	October 2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	INSPEKTORAT		21883263
4	Belanja Alat Tulis Kantor TW IV	19,00 JT	Barang	Pengadaan Langsung	October 2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	INSPEKTORAT		21875968
5	Belanja Alat Tulis kantor TW IV	500,00 RB	Barang	Pengadaan Langsung	October 2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	INSPEKTORAT		21882204
6	Belanja Alat Listrik dan elektronik TW IV	6,90 JT	Barang	Pengadaan Langsung	October 2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	INSPEKTORAT		21876620
7	Belanja Surat kabar/majalah TW IV	10,50 JT	Barang	Pengadaan Langsung	October 2019	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	INSPEKTORAT		21885441

Sumber: www.sirup.lkpp.go.id, 2020.

Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor yang dibagi menjadi 2 paket pekerjaan, yang pertama pengadaan mobil 2500 cc M/T berjumlah 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 419.000.000, (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah), dan pengadaan mobil 2000 cc M/T berjumlah 3 unit dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.071.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan penyedia melalui *e-Purchasing*. *e-Purchasing* sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing* Pasal 1 Ayat (3), *e-Purchasing* merupakan tata cara pembelian dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog

elektronik (e-katalog), produk yang sudah tampil di Katalog Elektronik dapat dibeli melalui metode *e-Purchasing* dalam e-katalog produk barang dan jasa sudah menampilkan informasi dari produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia, sehingga untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan metode *e-Purchasing* dilakukan dengan langsung memilih penyedia yang menjual barang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dengan pertimbangan harga, kualitas, suku cadang dan biaya perawatan.

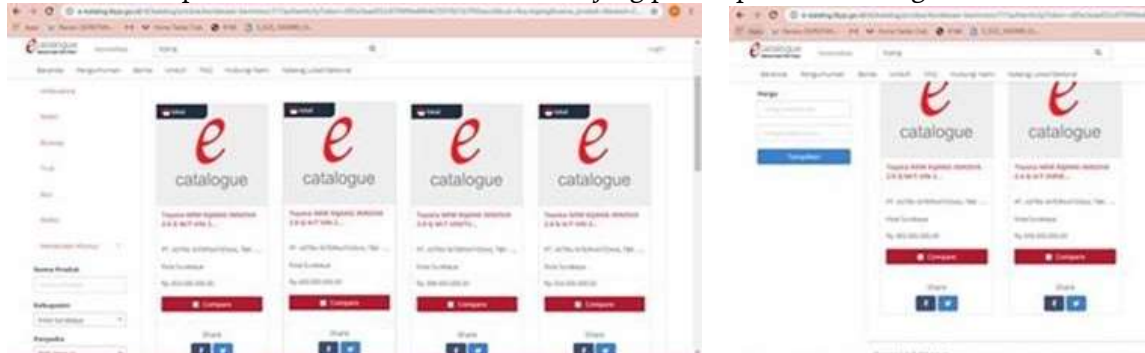
Bersaing

Bersaing dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 ayat (e) yaitu pelelangan atau seleksi yang sehat diantara penyedia barang dan jasa harus dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga diperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang baik dan tidak ada pengaruh dari pihak manapun yang dapat mengganggu terbentuknya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.

Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog dengan metode pemilihan *e-Purchasing* tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak manapun karena pemilihannya juga di dasarkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta melihat kewajaran harga yang diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (c) menjeaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa tidak boleh mempengaruhi pihak manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan persaingan antara penyedia barang dan jasa yang tidak sehat.

Dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui aplikasi e-katalog dengan paket pekerjaan pekerjaan 1 unit Mobil 2500 cc M/T dan 2 Unit Mobil 2000 cc M/T, memang tidak terjadi persaingan antara penyedia barang dan jasa, produk barang yang di butuhkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur hanya disediakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO yang merupakan distributor resmi mobil Toyota, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7 dan 8.

Gambar 7. Tampilan Halaman Pencarian Mobil Kijang pada Aplikasi e-katalog



Sumber: www.sirup.lkpp.go.id, 2020.

Dari gambar 7 dapat diketahui bahwa untuk 6 jenis mobil Toyota New Kijang yang ditampilkan melalui aplikasi e-katalog hanya disediakan oleh PT.ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. – TSO sebagai distributor resmi, sehingga dalam pengadaan Mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T VIN 2018 Dan Mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 Q M/T VENTURER VIN 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi e- katalog memang tidak terjadi persaingan antara penyedia, namun dengan memilih PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO sebagai penyedia dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur akan menghasilkan barang dengan kualitas yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 ayat (e).

Adil

Prinsip adil dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 ayat (f) yaitu memberikan perlakuan yang sama untuk seluruh

calon penyedia barang dan jasa serta tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Untuk menentukan penyedia hal utama yang menjadi patokan untuk memilih penyedia yaitu kesesuaian dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan, yang kedua yaitu suku cadang, biaya perawatan, kualitas dan lokasi penyedia.

Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan metode *e-Purchasing* melalui aplikasi e- katalog dengan paket pekerjaan pekerjaan 1 unit Mobil 2500 cc M/T dan 2 Unit Mobil 2000 cc M/T hanya di sediakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO sebagai distributor resmi mobil toyota, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.

Gambar 7 menunjukkan bahwa penyedia Mobil Toyota New Kijang hanya disediakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. – TSO sebagai distributor resmi, namun dengan memilih PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO sebagai penyedia barang dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu yang dapat menyebabkan persangan usaha yang tidak sehat, karena PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. –TSO merupakan distributor resmi mobil toyota, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7 ayat (e) semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mencegah dan menghindari terjadinya kepentingan antara pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat dalam Pengadaan barang dan jasa.

Akuntabel

Prinsip akuntabel dalam Peraturan Presiden RI Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat di pertanggung jawabkan hasilnya. Peneliti menganggap bahawa pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan secara akuntabel dengan melihat indikator :

- a. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dengan paket pekerjaan Mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T VIN 2018 sejumlah 2 unit dan Mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 Q M/T VENTIRER VIN 2018 dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (i) untuk pelaksanaan *e- Purchasing* yang nilainya paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- c. Ibu Anggun Anita Sari selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 19 Februari 2019 menunjuk PT.ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. – TSO sebagai satu- satunya penyedia barang serta merupakan distributor resmi mobil Toyota.
- d. Terdapat bukti serah terima hasil pekerjaan yang dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 antara PT.ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. – TSO Cabang Basuki Rachmat Surabaya dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- e. Terdapat Bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif yang dilakukan oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019.
- f. Terjadi serah terima barang/jas antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Pengurus Barang Aset Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019.

Dari 6 indikator tersebut pengadaan barang/jasa di Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dengan paket pekerjaan pengadaan mobil 2500 cc M/T dan pengadaan mobil 2000 cc M/T sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan hasil dari pengadaan barang tersebut.

PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan, penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog pada sub bagian tata usaha di Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dari penerapan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-purchasing. Kesimpulan dari penerapan prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu adanya tingkat efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Sesuai dengan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diberikan beberapa saran yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur lebih teliti dalam proses pengadaan barang dan jasa agar terpenuhinya jumlah kebutuhan dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan aturan hukum dengan memberlakukan sanksi terkait keterlambatan pemberian respon serta keterlambatan pengiriman barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Danuta, K. S. 2017. Crowe's Fraud Pentagon Theory Dalam Pencegahan Fraud Pada Proses Pengadaan Melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2): hal. 161-171.
- Dimiyati, A., Meilinda, S. D., & Akbar, F. M. (2019). Culture Approach As Innovation In Development Of Infrastructure. *Public Administration and Regional Development*. <https://doi.org/10.34132/pard2019.04.02>
- Faupel, S. L., Yusuf, N. Benjamin, A. O., & Rohini, P. (2016). Can Electronic Procurement Improve Infrastructure Provision? Evidence from Public Works in India and Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8 (3): hal. 258–283.
- Ratnawati, A., Audita, S., Ferry, F. T. & Louisiani, M. (2020). Transparency Of Procurement At The Ministry Of Finance Republic Of Indonesia. *Jurnal Of Economics, Finance & Accounting*, 1 (1): hal. 218-230.
- Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Katalog elektronik dan E- Purchasing.
- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.